

Jerit Tangis | Petani Bisa
Petani Sawit | Terlilit Utang

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : SEPTEMBER 2022



**KEMBALIKAN
KEDAULATAN RAKYAT!**



■ **Varia Senat**
**SENATOR
SAMPAIKAN
ASPIRASI DAERAH**

■ **Sekretariat Jenderal**
**LUAR BIASA!
DPD RI RAIH
OPINI WTP KE-16 KALINYA**

■ **Varia Senat**
**DUA KALI MANGKIR,
DPD RI TAK MAU
DILECEHKAN**



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

***SELAMAT HARI
PALANG MERAH INDONESIA***

3 September 2022



**Palang
Merah
Indonesia**

SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir
Sefti Ramsiaty

PEMIMPIN UMUM / PENANGGUNG JAWAB

Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI

Taufik Jatmiko

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO

Rima Octaviani Dwiarti

SEKRETARIS REDAKSI

Theresia Oktavina

STAF REDAKSI

Betria Eriani, Adhelia Larasati
Mas Aryo Kristiyanto, Arso P. Nugroho
Adhita Zehan, Fandi Tri Prayogo
Nanda Russia Rola

FOTOGRAFER

N. Nurdianto, Lela Sadiyah
Dimas Yulian Santoso, Haryo C. Wicaksono
Zaeki Adrian, Andrianto,
Surya Pongsitanan, Arifin Nur Wijaya,
Prabandaru Ega Baskoro
Fikri Muftih Akbar, Mujiono
Unang Gunawan, Ryan Nur Fajry

NARASUMBER / KONSULTAN MEDIA

Syafruddin Al, Syafril Amir, Bobby Lukman,
dan Portalindo (Desain Grafis)

DISTRIBUSI

Bagian Pemberitaan & Media DPD RI

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat 10270
Email : keranjang.senator@gmail.com
Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id
// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //
FB : www.facebook.com/DPDRI // twitter : @dpdri

Kerisauan Bersama

Dalam sebuah pertemuan khusus pimpinan lembaga negara dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, jelang peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerahkan peta jalan untuk menuju tercapainya kesejahteraan rakyat. Salah satu poin penting dari peta jalan itu adalah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Itu artinya, negara ini harus kembali dijalankan sesuai dengan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 sebelum amendemen.

Dalam berbagai kesempatan lainnya, LaNyalla selalu menyampaikan kerisauannya atas perjalanan negara saat ini yang sudah jauh menyimpang dari cita-cita luhur *founding fathers* bangsa ini. Indonesia terasa makin jauh dari Pancasila yang merupakan falsafah kehidupan bangsa. Ketua DPD RI dan banyak tokoh lainnya menyebut bahwa bangsa ini sudah dikuasai oleh oligarki, baik politik maupun ekonomi.

Tengok saja sila keempat yang berbunyi: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Apakah dua sila dari Pancasila ini sudah terjewantahkan atau sudah terwujud setelah bangsa ini merayakan 77 tahun kemerdekaannya?

Jika kita mau jujur — memakai istilah yang pernah dilontarkan LaNyalla — memang makin jauh panggang dari api. Keterwakilan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, misalnya, sudah diambil alih oleh partai politik karena amendemen 1 sampai 4 sudah berhasil mengubah pasalnya dalam UUD NRI Tahun 1945. Meski presiden dipilih langsung oleh rakyat, namun itu sama saja bak membeli kucing dalam karung. Rakyat hanya tinggal memilih yang nama-namanya sudah disuguhkan oleh Parpol melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lantas, bagaimana dengan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hari ini? Kita lihat saja masalah minyak goreng sebagai salah satu contoh kasus. Bagaimana mungkin minyak goreng bisa menghilang di pasaran di negara yang memiliki kebun sawit terluas di seluruh dunia? Kemudian, bagaimana pemerintah kesulitan mengatur kembali harga tandan buah segar (TBS) dari petani sawit ketika larangan ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) sudah dicabut? Belum lagi kita bicara hukum dan sebagainya. Yang jelas, kekayaan negara ini hanya dimiliki oleh segelintir orang. Mengukurnya mudah saja. Jika kekayaan 100 ribu atau 1 juta orang kaya di Indonesia dipisahkan, tinggal berapa pendapatan per kapita rakyat Indonesia hari ini?

Jadi, dengan amendemen yang sudah 4 kali ini, sepertinya Indonesia sudah tersesat dari jalan yang benar. Dan semakin parah lagi kalau merasa benar di jalan yang sesat itu. (*)

Pimred

SENAT UTAMA

6



- Kembalikan Kedaulatan Rakyat!
- DHD 45 DKI Dukung Kembali ke UUD 45 Naskah Asli
- Amendemen 1999-2002 Jauhkan Indonesia dari Pancasila

SENAT KHUSUS

12



- Jerit Tangis Petani Sawit
- DPD RI Tak Tinggal Diam
- Perusahaan Sawit Diminta Naikkan Harga TBS
- Aspirasi Petani Sawit Diteruskan ke Luhut
- Harga TBS Jatuh, DPD RI Panggil BPD PKS

NUSANTARA

18



- Petani Bisa Terlilit Utang
- Sidang Bersama, Presiden Apresiasi Lembaga Negara
- UU Masyarakat Hukum Adat Merupakan Perintah Konstitusi
- Perlu Dukungan DPD RI untuk Tenaga Nuklir
- Ada Kompor Gas dari Senator
- Mengapa Dana Pemda Menumpuk di Bank?
- Masyarakat Mentawai Tolak UU Sumbar
- Duta Maritim Minta DPD RI Jangan Menyerah
- Tiga Pemicu Maraknya Islamophobia di Indonesia
- Optimis, Jadi Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia
- Rektor USU: DPD RI Semakin Kuat
- Ada Terobosan di Tengah Keterbatasan
- Ikuti Sunnah Nabi Kok Disebut Kadrin
- Pagu DBH Belum Proporsional

VARIA SENAT

37



- Senator Sampaikan Aspirasi Daerah

- Cabai Salah Satu Pendongkrak Inflasi
- PMK Sedot Perhatian DPD RI
- Waropen Butuh Perhatian Khusus
- Daerah Harus Kreatif Gali Potensi PAD
- Daerah Minta DAU Dinaikkan: Mau Bayar Utang?
- Lahan Blok Masela Masih Bersengketa
- Dua Kali Mangkir, DPD RI Tak Mau Dilecehkan Lagi
- Pimpinan Alkel DPD RI Dikocok Ulang
- RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Segera Dibahas
- Komite I Perlu Aktif Awasi Kinerja GTRA di Daerah
- BULD akan Fokus Pantau Ranperda Pajak

SEKRETARIAT JENDERAL

54

- LUAR BIASA! DPD RI Raih Opini WTP Ke-16 Kalinya



KAJIAN DAERAH

56

- MENELAAH TEORI MANAJEMEN DAN KEPIMPINAN EFEKTIF PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPALA DAERAH YANG MENERAPKAN POLITIK DINASTI
(Studi Kasus Kabupaten Probolinggo)
Oleh: Khalizzad Khalis

OPINI

58



- Tugas Negara

SENAT KITA

60



- H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag:
PAW DPD RI dari Dapil Sumut

GALERI

62





Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (paling kanan) dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi dan ketua-ketua lembaga negara di Istana Negara, Jumat (12/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

KEMBALIKAN Kedaulatan Rakyat!



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Presiden Jokowi dan para ketua lembaga negara usai pertemuan di Istana Negara, Jumat (12/8/2022).

Dalam pertemuan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jumat pekan kedua Agustus 2022, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerahkan peta jalan kepada Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

“Tadi saya sampaikan langsung kepada presiden. Salah satunya adalah negara harus kembali menguasai kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 1945 dan penjelasannya di naskah asli sebelum diubah saat amendemen 1999-2002 silam, bukan untuk segelintir orang,” kata LaNyalla.

LaNyalla mengaku dirinya juga menyampaikan langsung tujuh poin usulan yang dirasa penting untuk disampaikan kepada presiden. Di antaranya rekomendasi atas Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019, terkait penataan sistem ketatanegaraan yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Kemudian terkait revisi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, untuk memasukan substansi mengenai eksistensi pene-gakan hukum kelautan secara komprehen-sif. Begitu juga Kebi-jakan Otsus Papua dan persoalan Surat Ijo di Surabaya juga menjadi poin yang disampaikan-

“

Penataan sistem ketatanegaraan merupakan Keputusan MPR RI Nomor 8/MPR/2019.

”

nya kepada Presiden Jokowi.

“Saya juga menyampaikan aspirasi umat Islam, bahwa keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamophobia, seharusnya diratifikasi, dan pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai kalender nasional hari melawan Islamophobia,” kata LaNyalla. (*)



DHD 45 DKI

Dukung Kembali ke UUD 45 Naskah Asli



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sedang menerima pengurus DHD 45 Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Umumnya Laksma TNI (Purn) Asep Saepudin di rumah dinas Ketua DPD RI di Jl. Denpasar Raya, Jakarta. (Foto: Setjen DPD RI).

Pengurus Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungannya kepada DPD RI untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan dengan adendum.

Dukungan disampaikan langsung pengurus DHD 45 saat menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Rumah Dinasnya, Jl. Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin akhir Agustus 2022.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum DHD 45 Provinsi DKI Jakarta Laksma TNI (Purn)

Asep Saepudin, A Rasyid Muhammad (Ketua I), H. Jaedi (Ketua II), Cecep Soehandi (Sekum), Munasihin (Sekretaris I), Satirah (Kabid Sosbud) dan Ramdhan (Kabid Infokom).

Laksma TNI (Purn) Asep Saepudin mengaku mengikuti perkembangan di media, termasuk *statement* Ketua DPD RI yang ingin memperjuangkan

konstitusi ke UUD 1945 naskah asli.

Menurutnya, perjuangan tersebut sejalan dengan kiprah yang dilakukan DHD 45 dalam melakukan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mempertahankan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Asep menambahkan, amendemen yang dilakukan pada 1999 sampai 2002 banyak melenceng sehingga harus dikoreksi. “Saya kira itu bukan perubahan tetapi penggantian Konstitusi. Karena perubahannya fundamental, tidak ada identitas konstitusi di dalamnya,” ujar Asep.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap resonansi gerakan kembali ke UUD 45 naskah asli sampai ke *grass*

root. Menurutnya, rakyat kecil harus diberi pemahaman, sehingga tahu ada solusi dalam menjawab permasalahan mereka.

Sebelumnya, puluhan Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur, juga menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tengah reses di Jawa Timur, di Graha Kadin Jatim. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap situasi bangsa dan meminta DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan Indonesia.

Ketua Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur, Rahmat Mahmudi, menjelaskan aliansi ini dibangun dari keprihatinan dan ghirah yang sama dari para pemuka agama dan tokoh Jawa Timur untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami bangsa. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sedang menerima dukungan dari Aliansi Ulama, Habaib & Tokoh Jawa Timur di Gedung Kadin, Jawa Timur, Surabaya. (Foto: Setjen DPD RI).

Amendemen 1999-2002

Jauhkan Indonesia dari Pancasila



Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amendemen 1999-2002 sudah terbukti menjauhkan Indonesia dari Pancasila dan membuat negara ini semakin liberalis dan kapitalistis. Satu-satunya jalan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat adalah dengan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 naskah asli.

“Selama 20 tahun sejak 2002, kondisi Indonesia bukannya semakin membaik. Tapi semakin menguatkan oligarki ekonomi dan politik,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menerima audiensi sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di kantor DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat pekan ketiga Juli lampau.

Hadir koordinator ARM Menuk Wulandari, perwakilan Konsemapsa (Konsentrasi Mahasiswa Peduli Bangsa) Razaq Ode, perwakilan buruh dari PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) Daeng dan beberapa aktivis lainnya. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Senator asal Kalimantan Selatan Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim.

LaNyalla mengakui, pasti ada pihak-pihak yang tidak mau kembali ke UUD 1945, dengan simplifikasi

seolah kembali ke Orde Lama dan Orde Baru, padahal konsep nilai UUD 1945 itu paling sesuai. “Makanya hanya perlu disempurnakan dengan cara adendum agar tidak mengulang kesalahan masa lalu,” sebutnya.

“

Setelah 20 tahun diamendemen, negara ini semakin jauh dari merdeka, rakyat semakin miskin, sumber daya alam semakin dikuras.

”

Kenapa harus kembali ke UUD 1945? Karena sejak amendemen 1999 sampai 2002 itu negara ini semakin jauh dari merdeka, rakyat semakin miskin, sumber

daya alam semakin dikuras oleh oligarki yang rakus. Kembali ke UUD 1945 naskah asli adalah solusinya.

LaNyalla menyebut, pemilihan presiden pun harus sesuai UUD 1945, yaitu oleh MPR RI sebagai lembaga tertinggi di Republik ini yang menampung semua elemen bangsa yang super majemuk ini. Ada partai politik, ada utusan daerah, ada utusan golongan, ada TNI-Polri. Bukan hanya ditentukan oleh partai politik saja.

Koordinator ARM, Menuk, sepakat dan mendukung penuh langkah DPD RI yang dinilai bisa menerima jeritan rakyat. Kami mendukung langkah Ketua DPD RI dan jajarannya. Kami berharap DPD RI sebagai lokomotif gerakan perubahan untuk wujudkan cita-cita nasional,” ucap Menuk. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Aliansi Rakyat Menggugat (ARM). (Foto: Setjen DPD RI)

Jerit Tangis Petani Sawit



Petani sawit di Luwu Utara (Lutra) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar aksi bakar buah kelapa sawit, baru-baru ini. Aksi ini sebagai bentuk protes karena harga tandan buah segar (TBS) sudah dua bulan anjlok menjadi Rp 2.000 per kilogram (kg), di bawah harga standar Rp 2.325/kg. (Foto Istimewa)

Sejak pemerintah melarang ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) serta produk turunannya mulai 28 April 2022 lalu, membuat petani sawit jadi menjerit. Soalnya, harga tandan buah segar (TBS) sawit yang pernah mencapai Rp4000/kg, langsung terjerembab menjadi Rp600/kg, bahkan pernah Rp500/kg.

Larangan ekspor CPO itu berawal dari melonjaknya harga minyak goreng di dalam negeri sejak Oktober 2021. Sebelum larangan ekspor CPO, harga TBS sawit di tingkat petani yang ditetapkan dinas perkebunan daerah ada yang mencapai Rp3.609/kg, bahkan Rp4.000/kg. Setelah larangan ekspor itu, kini harga TBS sawit dari petani ada yang dijual Rp500/kg.

Meski pemerintah telah mencabut kembali larangan ekspor CPO pada pekan ketiga Mei 2022, namun belum membuat petani sawit bangkit karena harga tak kunjung naik. Karena harga TBS yang rendah, menyulitkan kehidupan mereka.

Itulah sebabnya, para petani dan buruh sawit yang tergabung dalam Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) mengadu ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), awal Agustus lalu. Mereka meminta DPD RI memperjuangkan jerit tangis petani sawit yang semakin tertindas.

“Ada 17 juta petani dan buruh sawit yang merasa

tertindas selama 2 bulan terakhir,” keluh Koordinator JPSN Saoduan Sitorus saat diterima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Senator Bustami Zainudin (Lampung) dan Sukiryanto (Kalbar).

Saoduan menyebutkan, sekalipun pemerintah telah mencabut larangan ekspor, namun harga TBS sawit di tingkat petani tetap semakin anjlok dari Rp 4000/kg menjadi Rp 500/kg. Hal tersebut disebabkan pemerintah menggantinya dengan berbagai peraturan yang memperberat beban pelaku pasar, memperlambat dan mempersulit pasar.

“Jika TBS segitu, kami makan apa? Belum biaya panen, ongkos, juga pupuk dan biaya lain. Kami minta bantuan Ketua DPD RI untuk menyuarakan apa yang sedang kami alami ini,” pintanya.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berjanji akan menindaklanjuti aspirasi petani sawit itu dan akan dibahas lebih lanjut oleh Komite II DPD RI yang membidangi masalah perkebunan dan pertanian. (*)



Petani dan buruh sawit yang tergabung dalam Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN) menyampaikan aspirasi mereka kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (8/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

DPD RI Tak Tinggal Diam

DPD RI sendiri tidak berdiam diri dalam mengatasi masalah pelik yang sedang dihadapi petani sawit. Seperti yang dilakukan pada Kamis (11/8/2022), Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti memfasilitasi JPSN bertemu dalam satu forum dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin atas inisiatif sendiri juga menemui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat daerah, khususnya petani sawit.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin juga melakukan audi-



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Senator Bustami Zainudin ketika menerima petani dan buruh sawit yang tergabung dalam Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN), Senin (8/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

ensi dengan dua perwakilan perusahaan sawit di Kabupaten Kutai Timur, yaitu PT. KIN dan PT. KBN, di Sangatta, Kalimantan Timur, minggu (31/7 2022).

Pada kesempatan itu, Mahyudin,

menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama dari para petani sawit di Kutai Timur, Kalimantan Timur mengenai anjlok-nya harga TBS sawit. Dia meminta pengusaha sawit menaikkan harga TBS sawit milik petani. (*)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat melakukan audiensi dengan dua perwakilan perusahaan sawit di Kabupaten Kutai Timur, yaitu PT. KIN dan PT. KBN, di Sangatta, Kalimantan Timur, akhir Juli lalu. (Foto Setjen DPD RI)

Perusahaan Sawit Diminta Naikkan Harga TBS

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyudin meminta perusahaan sawit menaikkan harga tandan buah segar (TBS) sawit milik petani. Sebab, harga TBS sawit milik petani dibeli dengan harga yang sangat rendah, bahkan sampai di bawah Rp1.000/kg.

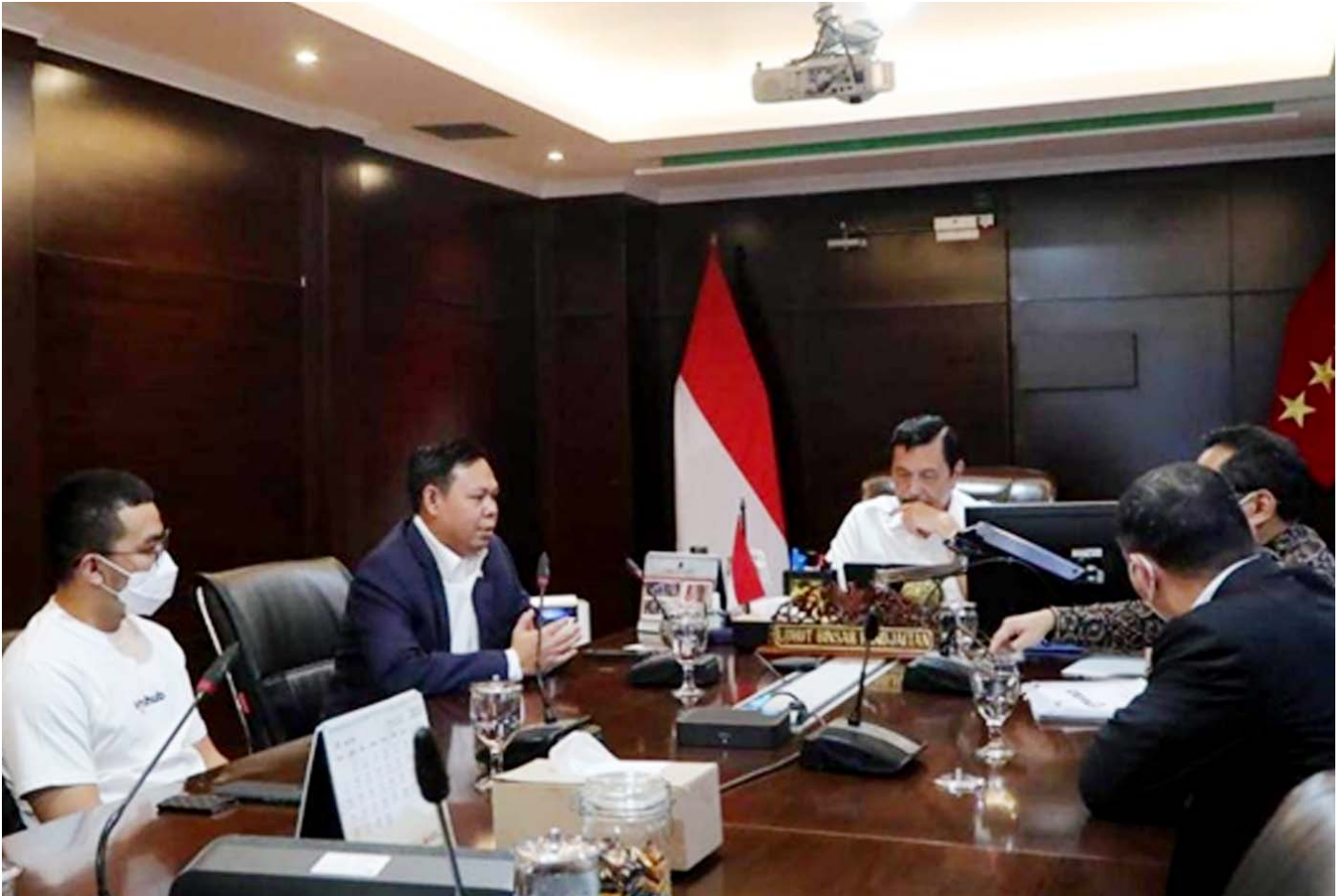
Padahal, pemerintah telah mencabut kembali larangan ekspor minyak mentah sawit atau *crude palm oil* (CPO) beserta turunannya. Harga CPO pun sudah mulai naik, namun harga jual TBS sawit milik petani tetap sajak anjlok. Perbandingannya sangat jauh berbeda dengan sebelum adanya larangan ekspor CPO pada akhir April 2022 lalu.

“Kenaikan harga CPO itu seharusnya diikuti dengan naiknya harga TBS sawit di tingkat petani. Sampai sekarang masih banyak perusahaan sawit membeli

TBS dari petani dengan harga murah, bahkan sampai di bawah Rp1.000/kg,” kata Mahyudin saat melakukan audiensi dengan dua perwakilan perusahaan sawit di Kabupaten Kutai Timur, yaitu PT. KIN dan PT. KBN, di Sangatta, Kalimantan Timur, akhir Juli lalu.

“Saya meminta kepada semua perusahaan sawit di Kutai Timur dan Kalimantan Timur pada umumnya segera menaikkan harga TBS sesuai yang ditetapkan pemerintah,” tegas anggota DPD RI dari Kalimantan Timur itu.

Menurut hitung-hitungan Mahyudin, jika harga TBS sawit dijual di bawah Rp1.000/kg dengan luas lahan yang dimiliki petani kurang dari lima hektar, maka tidak akan cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. Sejauh itu, pihak perusahaan sawit di Kutai Timur itu baru berjanji akan menaikkan harga TBS tersebut. (*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bertemu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Marves, Senin (8/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Aspirasi Petani Sawit Diteruskan ke Luhut

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin menemui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Marves untuk menyampaikan aspirasi masyarakat petani sawit di daerah, Senin awal minggu kedua Agustus 2022.

Dalam pertemuan tersebut, senator dari Bengkulu itu menyampaikan kondisi terkini terkait dinamika perkebunan sawit dan fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) di beberapa daerah penghasil sawit, termasuk di Bengkulu.

Untuk menyelesaikan persoalan tatakelola perkebunan kelapa sawit berikut produk turunannya, memiliki tantangan yang luar biasa kompleks. Sehingga membutuhkan figur pemimpin yang kuat dan berpengalaman untuk menemukan solusi permanen dalam industri perkebunan kelapa sawit.

“Kami atas nama masyarakat Bengkulu menyampaikan terima kasih atas inisiatif Pak Luhut dalam mewujudkan kemandirian pangan dan hilirisasi industri sawit dengan akan membangun pabrik pengolahan *crude palm oil* (CPO) di daerah kami. Dengan hilirisasi sawit diharapkan akan efektif menekan praktik monopoli harga CPO dan meningkatkan harga TBS sawit di tingkat petani,” kata Sultan. (*)

Harga TBS Jatuh, DPD RI Panggil BPDPKS



Pertemuan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi sejumlah senator dengan Direksi BPDPKS dan pejabat terkait dari Kementerian Pertanian serta petani sawit, Kamis (11/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Karena harga tandan buah segar (TBS) sawit tidak kunjung membaik, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memanggil pimpinan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan pejabat terkait Kementerian Pertanian untuk membicarakan nasib petani sawit.

Pertemuan digelar di ruangan kerja Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Dari BPDPKS hadir Eddy Abdurrachman (Direktur Utama), Zaid Burhan Ibrahim (Direktur Keuangan) dan Kepala Divisi USDM Adi Sucipto.

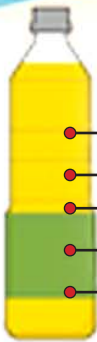
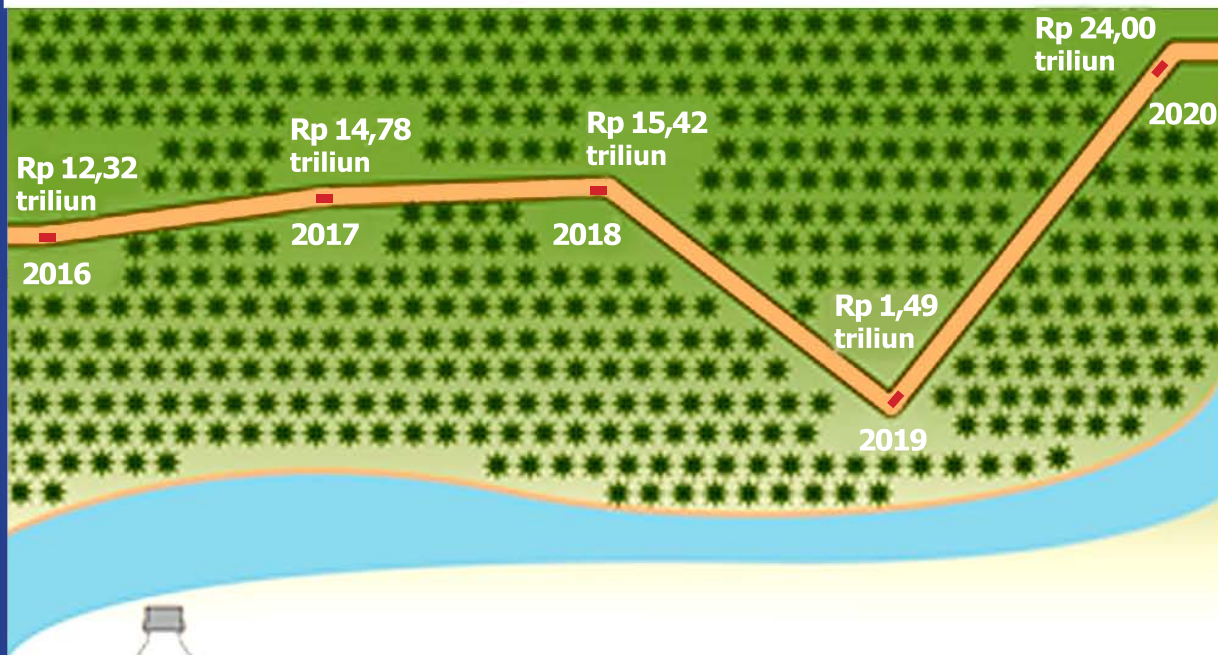
Sedangkan dari Kementerian Pertanian hadir Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Baginda

Siagian dan Sub Koordinator Pemasaran Domestik Ditjen Perkebunan Kementan Elvy Risma. Dari petani sawit Kobar Sembiring dan Soaduon Sitorus dari Jaringan Petani Sawit Nasional dan Pahala Sibuea dari Persatuan Organisasi Petani Sawit (POPSI).

Dalam pertemuan tersebut, BPDPKS menyatakan setuju untuk menaikkan dukungan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Rp60 juta/hektare yang diberikan kepada pekebun atau petani sawit yang memiliki luas lahan maksimal 4 hektare per kepala keluarga.

Hanya saja, kenaikan ini belum disetujui oleh Komite Pengarah yang terdiri dari para menteri yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sehingga BPDPKS statusnya akan mengusulkan kenaikan tersebut. (*)

Pendapatan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)



Tujuan Strategis BPDPKS

1. Terjaminnya keberlanjutan dana perkebunan kelapa sawit
2. Stabilisasi harga minyak kelapa sawit mentah (CPO)
3. Peningkatan kesejahteraan pekebun rakyat
4. Terciptanya iklim investasi yang positif pada industri sektor hilir
5. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja BPDPKS

Kinerja BPDPKS Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Dana	Keterangan
1	Penghimpunan dan pengelolaan dana	Rp 21,24 triliun	Berasal dari pendapatan pungutan ekspor produk CPO dan turunannya serta hasil pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit
2	Penyaluran dana peremajaan sawit rakyat (PSR)	Rp 2,67 triliun	Untuk areal seluas 94.033 hektar
3	Penyaluran selisih harga biodiesel	Rp 28,096 triliun	Untuk volume biodiesel sebanyak 8.428 juta kiloliter
4	Penyaluran dana riset	Rp 72,533 miliar	Untuk sebanyak 65 riset yang sedang berjalan
5	Penyaluran pengembangan SDM sawit	Rp 46,28 miliar	
5	Penyaluran dana program kemitraan dan promosi	Rp 46,28 miliar	
7	Penyaluran dana sarana dan prasarana	Rp 305,206 juta	

Sumber: Infografis Kompas.com

Petani Bisa Terlilit Utang



Pertemuan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi sejumlah senator dengan Direksi BPD PKS dan pejabat terkait dari Kementerian Pertanian serta petani sawit, Kamis (11/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Koordinator JPSN Soaduon Sitorus menjelaskan, dengan bantuan program PSR sebesar Rp30 juta, maka petani harus kembali berutang, sehingga yang terjadi malah justru terlilit utang. “Bukan membuat petani semakin mandiri, namun malah terlilit utang,” kata Sitorus.

Sitorus menyebutkan, persoalan sesungguhnya bukan bibit unggul atau bibit lokal. Untuk peningkatan hasil perkebunan sawit yang lebih utama adalah perawatan. “Kami sudah menghabiskan biaya investasi besar. Hanya karena bibit unggul lalu

harus di-parenting. Kami bisa perlihatkan bibit lokal bisa mengalahkan bibit unggul. Produktivitas rendah karena perawatan rendah, bukan karena bibit. Maka, solusinya adalah peningkatan perawatan,” tegas Sitorus.

Sitorus meminta BPD PKS dibubarkan karena dianggap tak begitu banyak memberikan manfaat untuk petani sawit. Padahal Sibuea dari Persatuan Organisasi Petani Sawit (POPSI) berharap ada yang membidangi khusus petani sawit di tubuh BPD PKS, sehingga fokus mengurus



Foto bersama se usai pertemuan antara Pimpinan dan anggota DPD RI dengan Direski BPD PKS dan utusan dari Kementerian Pertanian. (Foto: Setjen DPD RI)

segala keperluan petani.

“Dana yang digunakan BPDPKS itu kan dipungut dari petani juga. Maka, kami berharap ada yang membidangi khusus petani, sehingga jelas arahnya,” harapnya.

Senator M Syukur asal Provinsi Jambi mengaku mengetahui detail problematika yang dihadapi petani sawit. Dia minta BPDPKS menjelaskan secara terperinci, berapa dana yang ada sekarang, berapa dana yang disalurkan kepada petani, berapa besaran unit-unitnya, termasuk berapa dana yang tersisa.

“Kita ingin persoalan ini dapat segera diselesaikan agar petani sawit kita mendapatkan manfaat dari program yang digulirkan pemerintah,” tegas M Syukur.

Senator asal Provinsi Aceh Abdullah Puteh meminta agar petani sawit bisa mendapatkan keuntungan langsung tanpa waktu dan mekanisme yang cukup panjang. Kalau mengandalkan KUR Pertanian, implementasi di lapangan ternyata juga sulit diakses oleh petani. Alih-alih tanpa agunan, fakta di lapangan sulit diakses petani tanpa adanya jaminan.

Sedangkan Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin meminta pemerintah mengedepankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dalam hal ini petani sawit. Pemerintah itu hadir untuk memberikan solusi. Pemerintah itu kan bukan hanya memerintah.

Ketua DPD RI sendiri merasa belum menemukan titik terang atas persoalan yang dihadapi petani sawit. LaNyalla pun berharap persoalan ini dapat segera dituntaskan. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu meminta agar dijadwalkan pertemuan di Komite II dengan menghadirkan semua pihak secara lebih lengkap. (*)

Sidang Bersama, Presiden Apresiasi Lembaga Negara

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08/2022). Sidang bersama tahun ini dituanrumahi DPR RI.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kinerja yang ditunjukkan oleh lembaga-lembaga negara. Seperti upaya MPR RI dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara. Kepada DPR RI, presiden mengapresiasi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya penanganan krisis kesehatan dan perekonomian, serta pelaksanaan transformasi besar menuju Indonesia maju. Sedang untuk DPD RI presiden menghargai peran serta lembaga ini dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan otonomi khusus dan pembentukan provinsi baru.

Selain terhadap ketiga lembaga negara tersebut, Presiden Joko Widodo yang diampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu juga mengapresiasi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY). Kepala Negara juga mengapresiasi lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya, serta para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkuat fondasi kebangsaan serta merawat persatuan dan kesatuan nasional.

Pada Sidang Bersama yang dipimpin Ketua DPR RI Puan



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo pada Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, tanggal 16 Agustus 2022. (Foto Panitia Sidang Bersama DPR RI-DPD RI)

Maharani didampingi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, itu Presiden Joko Widodo tak lupa mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa saat ini sangat berat, sangat sulit, dan tidaklah mudah. Semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian yang sama. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit pasca Covid-19, tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Sedikitnya, kata presiden, ada 107 negara terdampak krisis dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh

bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan.

“Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan,” tegas Jokowi sembari menambahkan, Indonesia patut bersyukur, karena bangsa ini termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini dan ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44 persen.

Pada hari yang sama di parlemen, Presiden juga menyampaikan nota keuangan RAPBN 2023 di hadapan sidang DPR RI. (*)

DUNIA

Krisis Global



553 juta jiwa di dunia terancam miskin ●



● Covid-19 masih ada



107 negara terdampak
dan bisa bangkrut ●



● Perang di Ukraina masih
berlangsung



Krisis energi ●



● Krisis pangan



Sumber: Infografis dari DPD RI

UU Masyarakat Hukum Adat Merupakan Perintah Konstitusi

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Agustin Teras Narang menegaskan, Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, bukan sekedar kehendak beberapa orang atau masyarakat adat, melainkan perintah konstitusi, yaitu UUD 1945.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18b ayat 2 UUD 45, yakni negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

“Jadi, pemerintah dan DPR RI bersama DPD RI harus diingatkan terkait RUU Masyarakat Hukum Adat ini. Kesannya RUU ini tak bergerak-gerak, padahal perintah UUD 45,” kata Teras dalam webinar soal Masyarakat Hukum Adat yang digelar Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) baru-baru ini.



Masyarakat hukum adat Dayak. (Foto Istimewa)

Ditegaskan, reformasi tahun 1998 benar-benar memahami

tuntutan masyarakat, agar kiranya masyarakat hukum adat yang ada di seluruh wilayah Indonesia harus diakui, dihormati, diperhatikan dan dilindungi adat.

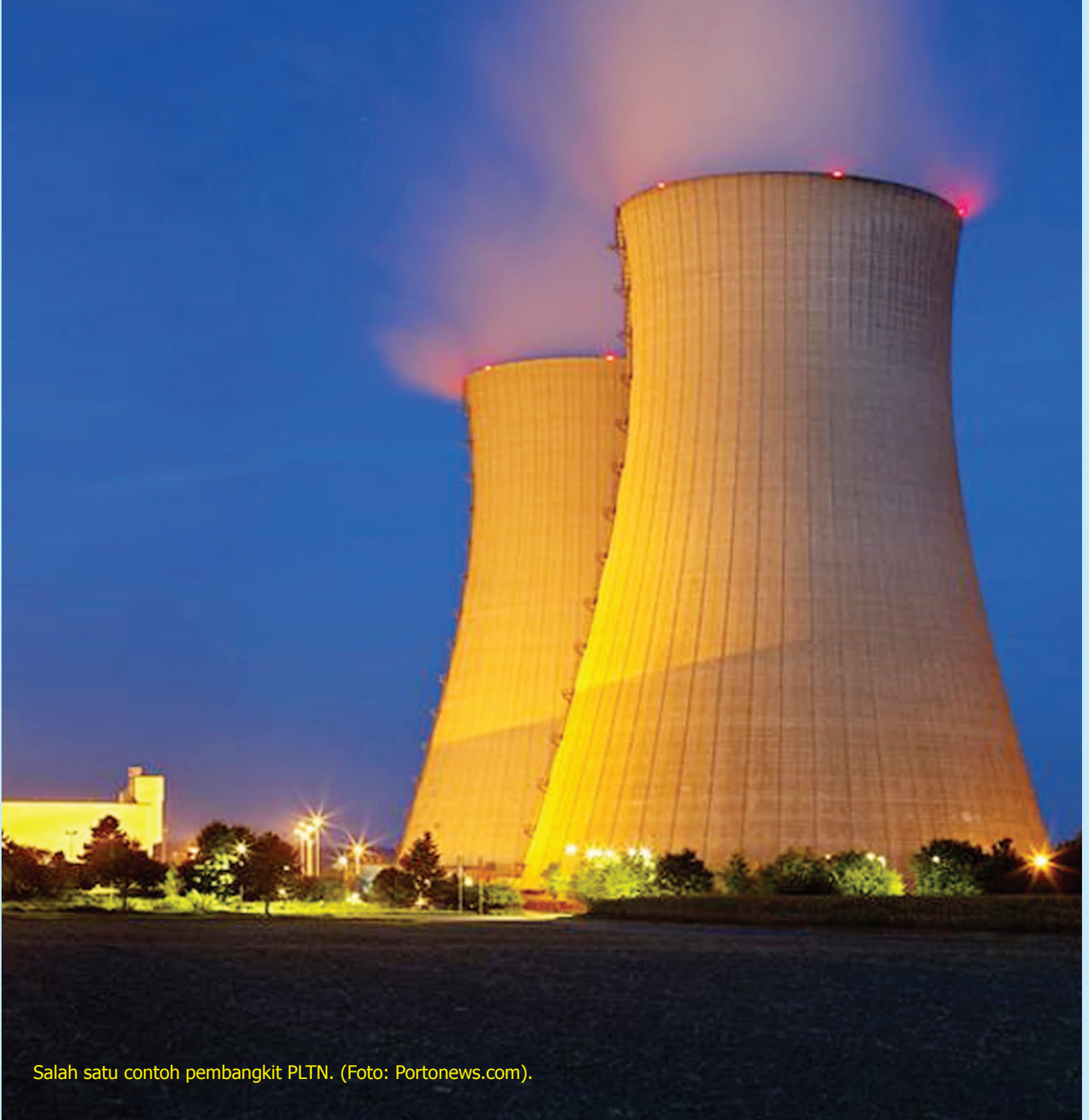
“Saya di DPD RI juga terus mengingatkan ada tugas dan perintah UUD 45 yang harus segera dilaksanakan pemerintah, DPR RI, DPD RI, yakni UU tentang Masyarakat Hukum Adat,” kata Teras Narang. (*)



Agustin Teras Narang

Anggota DPD RI (Foto Setjen DPD RI)

Perlu Dukungan DPD RI untuk Tenaga Nuklir



Salah satu contoh pembangkit PLTN. (Foto: Portonews.com).



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima audiensi Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), Senin (8/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) meminta dukungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) agar tenaga nuklir dimanfaatkan oleh bangsa ini sebagai sumber energi.

Pihaknya sudah lama memperjuangkan lahirnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Bahkan mereka sudah sering diminta melakukan kajian nuklir sebagai sumber energi. Namun upaya itu belum berhasil karena kebijakan pemerintah yang belum memberi prioritas pada nuklir. Pemerin-

tah secara resmi belum ada menyatakan ingin nuklir jadi energi.

“Kami sengaja minta dukungan Ketua DPD RI karena dalam catatan kami sudah dua kali Pak LaNyalla mendukung pembangunan PLTN di Indonesia. Pertama saat pidato di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2012 dan kedua ketika bertemu Dewan Energi Nasional (DEN) belum lama ini,” ujar Susilo saat audiensi dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta,

Senin awal Agustus lalu.

Ketua DPD RI LaNyalla kembali menegaskan bahwa dirinya secara tegas mendukung pembangunan PLTN. LaNyalla mengaku sudah menyuarakannya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

“Tetapi rupanya masih ada segelintir oligarki ekonomi yang jadi penikmat kue energi fosil. Ini yang saya sebut segelintir orang yang menyandera kebijakan negara untuk kepentingan mereka. Sehingga subsidi energi negara terus membesar,” tegas senator dari Jawa Timur itu. (*)



Penyerahan bantuan kompor gas buat penyintas bencana banjir di Kabupaten Garut dari anggota DPD RI. (Foto Setjen DPD RI)

Ada Kompor Gas dari Senator

Tiga senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, Jawa Barat awal Agustus 2022. Mereka menyerahkan kompor gas bagi korban bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di daerah itu 15 Juli 2022 lalu.

Kunjungan ketiga senator itu, yaitu Asep Hidayat, Amang Syarifudin, dan Eni Sumarni diterima oleh Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jl. Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

“Saya ucapkan terimakasih atas takziahnya sekaligus juga pemberian bantuan. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT



Banjir bandang yang melanda salah satu wilayah di Kabupaten Garut, Juli 2022. (Foto: PR.com)

dengan balasan yang berlimpah, aamiin,” ucap Wabup Garut.

“Kami bersyukur tidak ada korban jiwa secara langsung akibat bencana banjir dan longsor ter-

sebut,” kata Anggota DPD RI Eni Sumarni sembari berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengantisipasi bencana serupa di kemudian hari. (*)



Ilustrasi dana mengendap di bank. (Foto Istimewa)

Mengapa Dana Pemda Menumpuk di Bank?

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti banyaknya dana atau anggaran yang dimiliki pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Juni 2022, saldo pemda yang mengendap di bank mencapai Rp220,9 triliun. Jumlahnya terus naik dari bulan-bulan sebelumnya. Pada Januari 2022 sebesar Rp157,97 triliun, Februari Rp183,3 triliun, Maret Rp202,3 triliun, April Rp191,5 triliun, dan Mei 2022 Rp200,7 triliun.

LaNyalla mengatakan, uang kas daerah tersebut sebaiknya dioptimalkan untuk percepatan pembangunan dan pergerakan ekonomi, secara signifikan. Penumpukan kas itu menunjukkan

belanja daerah kurang optimal. Berarti pula minimnya serapan dana daerah.

Dampak yang lebih parah lagi yaitu tidak adanya pergerakan pembangunan, kegiatan ekonomi dan sosial serta terhentinya pemberdayaan masyarakat. Wajar pemda memiliki kas di bank, agar siap berbelanja. Namun, kalau sudah menumpuk tidak boleh terjadi.

Kepala daerah harus pandai melihat situasi dan kondisi. Mereka harus tahu kapan anggaran itu diperlukan dan kapan harus tersimpan. “Tak bijak kalau menumpuk dana terlalu lama di tengah kondisi seperti ini. Jangan sampai juga muncul anggapan dari masyarakat bahwa kepala daerah mencari keuntungan dengan cara pengendapan anggaran di bank,” tegas LaNyalla. (*)

Masyarakat Mentawai Tolak UU Sumbar

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai menolak Undang-Undang (UU) Np. 17/2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang sudah disahkan oleh DPR RI. Mereka menilai, UU Sumbar mengkerdilkan budaya Mentawai.





Aliansi Mentawai Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang menolak UU Provinsi Sumbar, Selasa (9/8/2022). (Foto Istimedia)

Koalisi tersebut menilai UU tentang Provinsi Sumatera Barat itu bermasalah karena tidak memuat pasal mengenai kebudayaan asli Minangkabau secara keseluruhan yang di dalamnya termasuk kebudayaan Mentawai.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin menyarankan kepada masyarakat adat Mentawai untuk melakukan *judicial review* (JR) terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejak awal dirinya sudah menduga bahwa kehadiran UU

Sumbar yang baru tersebut akan menuai kontroversi, baik secara lokal di tingkat daerah maupun di level nasional. Namun sebagai warga negara wajib menghormati hasil dari setiap proses politik kebijakan yang berlangsung di lembaga legislatif, khususnya DPR RI. Karena tidak semua produk UU yang dihasilkan mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait.

“Kami sangat memahami psikologi masyarakat adat Mentawai yang merasa diabaikan dengan ketentuan dalam UU Sumbar yang baru. Tentu hal semacam ini tidak boleh diabaikan agar tidak menjadi polemik di level daerah dalam jangka panjang,” kata senator dari Bengkulu itu, Rabu (3/8/2022).

Anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat Alirman Sori juga menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Mentawai atas pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat tersebut dalam Sidang Paripurna DPD RI, Senin (15/8/2022).

Alirman menyampaikan hal tersebut untuk menindaklanjuti dari aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Mentawai Bersatu dan Perwakilan Mahasiswa Mentawai, kepada dirinya pada Jumat (13/8/2022) lalu.

“Mentawai sebagai bagian teritorial wilayah Sumbar. Masyarakat Kabupaten Mentawai memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten dan kota lainnya di Sumbar,” kata Alirman Sori. (*)



Anggota DPD RI dari Sumbar Alirman Sori (Foto Setjen DPD RI)



Sultan B Najamudin (Foto Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerahkan cenderamata kepada Direktur Eksekutif Aspekindo Andi Fajar Asti. (Foto Setjen DPD RI)

Duta Maritim Minta DPD RI Jangan Menyerah

Duta Maritim Indonesia meminta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) jangan menyerah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.

Sebab, materi RUU Daerah Kepulauan menjawab kebutuhan-kebutuhan para nelayan dan masyarakat pesisir yang masih tertinggal dan tinggal di daerah kepulauan. Hal tersebut juga mempermudah para kepala daerah di daerah kepulauan dalam menyejahterakan masyarakatnya.

“Kami berharap DPD RI terus memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan ini agar bisa disahkan,” ujar Direktur Eksekutif Aspekindo Andi Fajar Asti saat audiensi Duta Maritim Indonesia dengan Ketua



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berfoto bersama dengan para Duta Maritim Indonesia. (Foto Setjen DPD RI)

DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Jumat (12/8/2022).

Duta Maritim Indonesia terdiri dari putra-putri pilihan dari Sabang-Merauke yang pemilihannya dilaksanakan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo).

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan,

lembaga yang dipimpinnya selalu konsen pada persoalan maritim. Buktinya, DPD RI menginisiasi RUU Daerah Kepulauan.

“Persoalannya macet di DPR RI. Maka kita dorong bersama-sama. Semua tahu, kewenangan DPD RI terbatas, hanya menerima aspirasi dan mengusulkan. Tetapi eksekusi-nya ada di DPR RI,” kata senator dari Jawa Timur itu. (*)

Tiga Pemicu Maraknya Islamophobia di Indonesia



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika memberikan *keynote speech* pada Kongres ke-2 Umat Islam Sumatera Utara, di Medan, Jumat (26/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Ketika memberikan *keynote speech* pada Kongres ke-2 Umat Islam Sumatera Utara, di Medan, Jumat (26/8/2022), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebutkan marak islamophobia di Indonesia belakangan ini disebabkan tiga persoalan mendasar selain faktor geopolitik internasional.

Pemicu pertama adalah polarisasi. potensi konflik antar kelompok masyarakat terjadi sejak era kontestasi pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung yang disertai dengan ambang batas pencalonan.

Faktor kedua adalah semangat membangun kebhinekaan dilakukan dengan kampanye moderasi

bergama yang tidak tepat sasaran. Seolah agama harus secara masif dan dipaksa untuk dimoderatkan.

Sedangkan faktor ketiga adalah perubahan atas naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 yang telah mengubah 95 persen isi pasal-pasal sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. (*)



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (kanan) saat menghadiri *Topping Off* Menara Syariah oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta, Selasa (23/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Optimis, Jadi Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono optimis Indonesia akan menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Keyakinannya semakin kuat setelah pembangunan Menara Syariah, yang juga menjadi bagian dari Islamic Financial Centre.

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah internasional, utamanya di

Jakarta, diperlukan konsolidasi dari seluruh pemangku kepentingan keuangan syariah Indonesia yang meliputi regulator dan sejumlah asosiasi.

“Dengan bersatunya kekuatan semua stakeholders tersebut, Indonesia akan menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia yang diperhitungkan selain Dubai, Bahrain, Doha, Riyadh, Istanbul dan Kuala Lumpur,” kata Nono

saat menghadiri *Topping Off* Menara Syariah oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta, Selasa pertengahan Agustus.

Nono Sampono menilai finansial syariah menjadi pilihan tepat untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Apalagi fakta menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. (*)



Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amir (paling kanan) bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama sejumlah senator di Kampus USU, Medan, Sumatera Utara. (Foto Setjen DPD RI)

Rektor USU: DPD RI Semakin Kuat

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amir menilai kehadiran sosok AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di DPD RI telah berdampak positif bagi lembaga yang lahir di awal reformasi tersebut.

DPD RI kian hari semakin kuat dan mulai meningkatkan perannya. Rekonstruksi itu terjadi di bawah kepemimpinan LaNyalla. LaNyalla, katanya, kembali memberikan *stretching point* penting mengenai penguatan DPD RI itu

sendiri.

Pada tahap kedua, lobinya setengah berhasil. Misal, harusnya memiliki kekuatan untuk menetapkan undang-undang. Dari hanya bisa ikut terlibat dalam mengusulkan, tapi tidak bisa menetapkan.

“Karena DPD RI lahir sebagai salah satu lembaga legislatif untuk memperkuat lembaga daerah. Kita tidak bicara mengenai siapa yang lebih kuat, tetapi distribusi kekuasaan itu bisa sangat penting,

terutama membicarakan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing fungsi yang diperankan oleh semua anggota legislatif,” Muryanto Amir.

Penilaian itu disampaikan Muryanto Amir saat Kuliah Umum Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertema ‘Rekonstruksi Terhadap Kewenangan Istimewa Lembaga Legislatif di Indonesia Melalui Amendemen Undang-Undang Dasar 1945’ di Kampus, USU Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/8/2022). (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Rektor UMA Dadan Ramdan. (Foto Setjen DPD RI)

Terbatasnya wewenang yang diberikan konstitusi telah menghambat kiprah DPD RI untuk mempercepat akselerasi dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai wakil dari daerah. Namun di tengah keterbatasannya itu, DPD RI akan terus melakukan terobosan untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

“Oleh karena itu, saya melakukan terobosan melalui dua cara. pertama adalah optimalisasi kinerja dalam situasi yang ada sekarang. Kedua, melakukan terobosan-terobosan kreatif yang bisa dilakukan selama masih dalam koridor konstitusi,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Saat mengisi kuliah umum bertema ‘Peran DPD RI dalam Pembentukan Undang-Undang yang Mengakomodir Kepentingan Daerah’ di Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA), Medan, Kamis (25/8/2022), LaNyalla menyebutkan, terobosan tersebut cukup efektif untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi stakeholder di daerah.

“Yang pertama, saya pertemukan secara langsung para pihak dengan pembuat kebijakan di eksekutif dalam satu forum untuk secara tuntas mengambil



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika memberikan kuliah umum bertema ‘Peran DPD RI dalam Pembentukan Undang-Undang yang Mengakomodir Kepentingan Daerah’ di Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA), Medan, Kamis (25/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

kesepakatan penyelesaian persoalan-persoalan tersebut. Cara kedua, menyampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Presiden RI sebagai kepala pemerintahan atau sebagai kepala negara.

“Tujuan, agar presiden mengetahui secara persis duduk permasalahan yang terjadi di daerah. Namun, cara yang kedua ini, sepenuhnya menjadi domain presiden. Apakah akan ditindaklanjuti atau tidak,” kata LaNyalla. (*)

IKUTI SUNNAH NABI Kok Disebut Kadrun

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku heran jika seorang muslim yang mengikuti sunnah nabi masih ada yang mengolok dengan sebutan kadrun. Padahal agama menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama sesuai keyakinannya, sesuai Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945.



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menyampaikan keynote speech di Kongres ke-2 Umat Islam Sumatera Utara, di Medan, Jumat (26/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Terlihat dari kiri mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais dan anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara. (Foto Setjen DPD RI)

“Makna dari kalimat Ayat 2 itu jelas, beribadat menurut agama dan kepercayaan itu dijamin negara. Artinya, kalau ada umat Islam yang menjalankan sunnah nabinya dengan memelihara jenggot, itu wajib dijamin oleh negara sebagai kemerdekaan atas pilihannya. Bukan malah distigma teroris atau belakangan ini malah diolok kadrung dan disebut radikal,” tegas LaNyalla, saat menjadi *keynote speech* di Kongres ke-2 Umat Islam Su-

matera Utara, di Medan, Jumat akhir Agustus lalu.

Para pendiri bangsa ini sebenarnya sudah berpikir jauh ke depan. Dengan pikiran luhurnya, para pendiri bangsa menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan yang mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Sehingga, propaganda Islamophobia sudah seharusnya tidak bisa tumbuh subur di negeri ini.

“Sebagai umat yang memiliki andil besar lahirnya bangsa dan negara ini, sudah seharusnya umat Islam kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. Umat Islam harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik itu soal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut,” tegasnya. (*)

PAGU DBH BELUM PROPORSIONAL

Pemerintah mengalokasikan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada RAPBN 2023 sebesar Rp 811.718,5 miliar, atau lebih tinggi sebesar Rp 12.616,7 miliar atau 1,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski pemerintah sudah menaikkan pagu anggaran TKD 2023, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin melihatnya masih belum ideal, khususnya pada pagu dana bagi hasil (DBH). Dia menilai DBH

belum proporsional bagi daerah.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, mengungkapkan, di tengah fenomena *windfall profit* komoditas seperti minyak mentah sawit atau *crude palm oil* (CPO) dan batubara, porsi DBH seharusnya bisa ditingkatkan secara proporsional bagi daerah penghasil komoditas strategis.

Karena daerah-daerah tersebut memiliki beban fiskal yang lebih besar daripada daerah lainnya

dalam merawat kualitas infrastruktur hingga keberlanjutan industri komoditas strategis.

“Keluhan terkait pagu DBH daerah menjadi aspirasi yang selalu kami terima dari setiap pemerintah daerah penghasil komoditas strategis. Sehingga menurut kami, sebaiknya pagu DBH seharusnya bisa dihitung sesuai produktivitas dan nilai ekspor komoditas strategis di daerah,” kata Sultan menanggapi postur RAPBN 2023, Senin (22/8/2022). (*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima laporan dari anggota DPD RI asal Jawa Barat Eni Sumarni. (Foto Setjen DPD RI)

Senator Sampaikan Aspirasi Daerah

Para senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), menyampaikan aspirasi yang mereka serap selama masa reses di dalam Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, Senin, pertengahan Agustus 2022.

Anggota DPD RI yang duduk di Komite I menyampaikan laporan penyerapan aspirasi terkait wacana penghapusan tenaga honorer. Dari beberapa laporan diketahui bahwa pemerintah daerah masih sangat membutuhkan tenaga honorer dalam pelaksanaan pekerjaan teknis terkait pelayanan kepada masyarakat.

“Penghapusan tenaga honorer dapat mengganggu aktivitas di lingkungan pemerintahan daerah. Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Karena pemerintah daerah sangat

membutuhkan tenaga honorer untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat,” kata Anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan Habib Hamid Abdullah.

“

Penghapusan tenaga honorer dapat mengganggu aktivitas di lingkungan pemerintahan daerah.

”

Membidang Komite II DPD RI, sebagian besar anggota DPD RI menyampaikan laporan terkait penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dialami peternak di berbagai daerah. Keberadaan PMK dinilai mengganggu rantai pasokan daging di masyarakat dan juga merugikan para peternak.



Para anggota DPD RI foto bersama usai Sidang Paripurna Ke-13 Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, Senin (15/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

“Para peternak yang terdampak meminta kerja sama dari Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Perdagangan untuk menyediakan vaksin PMK,” kata anggota DPD RI dari Jawa Barat Eni Sumarni.

Untuk bidang Komite III, laporan-laporan penyerapan aspirasi anggota DPD RI di daerah dilakukan terkait UU No. 18 Tahun 2014 tentang Ke-sehatan Jiwa. Dari laporan yang disampaikan masih diwarnai mengenai keterbatasan dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa.

“Di Kalimantan Utara belum memiliki tempat seperti rumah sakit khusus jiwa. Diharapkan ke depan dapat segera memilikinya,” kata anggota DPD RI dari Kalimantan Utara Hasan Basri.

Sedangkan untuk bidang Komite IV, para anggota DPD RI memfokuskan pada pengawasan atas

pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN dan -pengawasan atas pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait pengawasan UU OJK, anggota DPD RI dari DI Yogyakarta Hilmy Muhammad mengatakan bahwa pelaksanaan UU tersebut sudah baik di provinsinya. Namun tetap dibutuhkan adanya pengawasan terhadap lembaga keuangan non bank oleh OJK.

“Terutama lembaga keuangan non bank yang turun sampai ke masyarakat desa, seperti pinjaman *online* (pinjol) melalui handphone atau aplikasi,” kata Hilmy Muhammad.

DPD RI selanjutnya akan segera menindaklanjuti setiap aspirasi yang terkumpul disampaikan anggota DPD RI dari masing-masing provinsi untuk segera diperjuangkan di tingkat pusat. Setiap aspirasi tersebut akan diteruskan ke masing-masing alat kelengkapan yang membidangi. (*)

Cabai Salah Satu Pendongkrak Inflasi



Ketua Komite IV DPD RI (2022-2023) Elviana menyerahkan berita acara rapat kerja kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto Setjen DPD RI)

Komite IV DPD RI menyoroti tingkat inflasi yang terjadi saat ini sudah melampaui asumsi APBN 2022. Karena itu, Bank Indonesia dan Pemerintah diminta meningkatkan koordinasi untuk menjaga harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Dalam Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI bersama Tim Anggaran Komite I, II, dan III DPD RI dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (25/08/2022), anggota DPD RI Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa menyebut inflasi per Juli 2022 sudah melam-

pau target asumsi APBN 2022.

“Kontributor utama inflasi berasal dari bahan pangan, secara khusus cabai. Kami minta Bank Indonesia dan pemerintah perlu meningkatkan koordinasi untuk menjaga harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat,” kata senator dari Sumbar itu.

Ketua Komite IV (2022-2023) Elviana juga menyoroti inflasi yang sudah melampaui asumsi APBN 2022. Dia mempertanyakan kinerja Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID). “Siapa yang mengevaluasi TPID?,” kata senator dari Jambi tersebut

Dana Otsus Aceh

Dalam rapat tersebut, Elviana juga menyoroti dana Otsus Provinsi Aceh pada RAPBN 2023 yang mengalami penurunan. Penurunannya cukup drastis, yaitu dari tahun 2022 sebesar Rp7,6 triliun menjadi Rp4 triliun dalam RAPBN 2023.

“Penurunan dana otsus Provinsi Aceh ini dikhawatirkan akan mengganggu agenda pembangunan daerah di Provinsi Aceh,” kata Elviana. Turunnya dana Otsus Aceh tersebut juga merisaukan anggota DPD RI dari Provinsi Aceh Sudirman Karena menu-

rutnya, Aceh merupakan provinsi termiskin di Pulau Sumatera.

“

Penurunan dana otsus Provinsi Aceh ini dikhawatirkan akan mengganggu agenda pembangunan.

”

”Aceh merupakan provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Bagaimana APBN mampu menyelesaikan persoalan tersebut?” tanya Sudirman yang akrab disapa Haji Uma itu. (*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam rapat kerja gabungan Komite IV bersama Tim Anggaran Komite I, II, dan III DPD RI dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas, akhir Agustus lalu

PMK Sedot Perhatian DPD RI



Komite II DPD RI yang dipimpin ketuanya Yorrys Raweyai ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (9/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sapi milik masyarakat di Tanah Air sejak beberapa bulan terakhir ini telah menyedot perhatian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Melalui alat kelengkapannya yang membidangi peternakan, yaitu Komite II DPD RI telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk mengetahui dan melihat secara langsung ke lapangan. Seperti ke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa

(9/8/2022).

Di Kabupaten Jenponto, pertemuan dilaksanakan di Aula Kecamatan Bangkala. Pada kesempatan itu diserahkan vaksin PMK secara simbolis oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai kepada Bupati Jeneponto Iksan Iskandar sebanyak 1.000 dosis, dan oleh Wakil Ketua Komite II Lukky Semen dengan perwakilan Dandim 1425 Jeneponto sebanyak 1.000 dosis.

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar melaporkan, penanganan virus PMK sampai dengan 3 Agustus 2022, terdapat 410 ekor sapi dan 349 kerbau



Komite II DPD RI saat melakukan dialog terkait kasus PMK di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (9/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

yang sakit. Kemudian potong bersyarat hanya 1 ekor sapi, kemudian terdapat 6 ekor sapi yang mati, serta yang telah sembuh sebanyak 14 ekor sapi. Sisa kasus masih terdapat 390 ekor sapi dan 349 ekor kerbau.

Kegiatan vaksinasi telah dilakukan di seluruh kecamatan dengan capaian 788 ekor sapi, 153 ekor kerbau, dan 70 ekor kambing yang telah divaksin. Sedangkan populasi ternak hingga triwulan II di daerahnya, yaitu sapi sebanyak 28.618 ekor, kerbau 3.154 ekor, dan kambing 246.711 ekor.

Sleman Tertinggi di DIY

Kunjungan Komite II DPD RI ke Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipimpin Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh (Aceh). Pertemuan dilaksanakan di Kantor Bupati Sleman.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan, PMK cukup meresahkan masyarakat Kabupaten Sleman, khususnya peternak. Total kasus PMK di Sleman mencapai 6.515 yang terdiri dari 3.510 kasus aktif, 2.483 kasus sembuh, 322 mati, dan 200 potong bersyarat. (*)

Waropen Butuh Perhatian Khusus

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan perhatian khusus atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Waropen, Papua.

Sebab, selama 14 tahun, mulai dari tahun 2007 sampai 2020 mendapat penilaian atau opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari BPK RI. Bahkan, untuk tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Waropen belum menyampaikan LKPD-nya ke BPK RI.

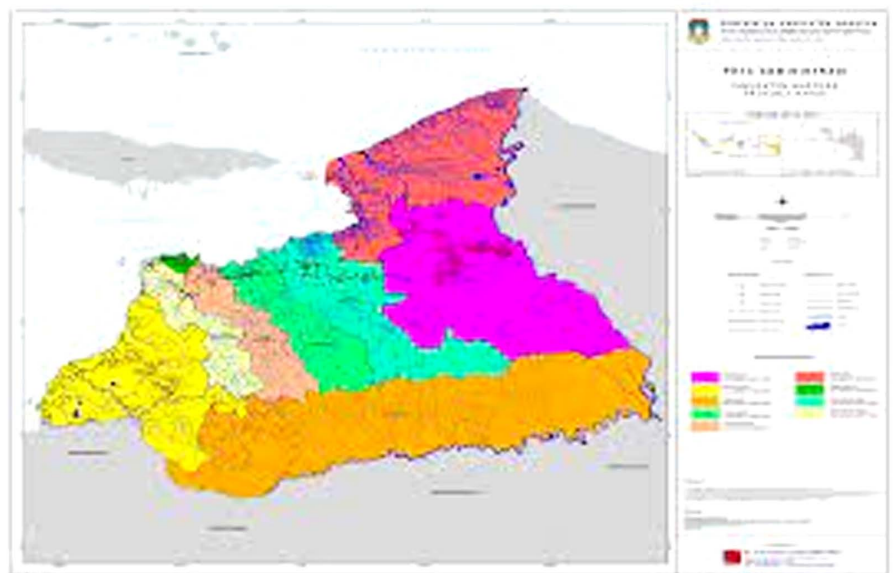
“Waropen butuh perhatian khusus dari kita semua agar menjadi lebih baik,” kata Senator Ajiep Padindang (Sulawesi Selatan) dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua, BPK RI dan BPKP Perwakilan Papua, saat kunjungan kerja ke Papua, Kamis (11/8/2022).

BPK RI Perwakilan Papua yang diwakili oleh Subagyo selaku Sub Direktorat Papua 3 mengungkapkan berbagai permasalahan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Waropen. LKPD Waropen tahun 2021 belum disampaikan kepada BPK RI hingga batas waktu penyampaian 31 Maret 2022. Selain itu, sejak 2007 sampai 2020, semua hasil pemeriksaannya mendapatkan opini *disclaimer* atau TMP.

“Kami harap dari kunjungan



Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto bersama sejumlah senator melakukan kunjungan kerja ke Papua. Sukiryanto menyerahkan cenderamata kepada Sekda Papua M Ridwan Rumasukun. (Foto Setjen DPD RI)



ini akan dapat merumuskan rekomendasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPK RI, BPKP dan pihak-pihak terkait agar opini atas laporan keuangan

pemerintah Kabupaten Waropen ini dapat meningkat menjadi lebih baik,” kata Ketua Komite IV Sukiryanto yang memimpin pertemuan itu. (*)

Daerah Harus Kreatif Gali Potensi PAD



Pertemuan Komite IV DPD RI dengan Bupati Belitung Timur Burhanudin beserta jajarannya, Jumat (12/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Darmansyah Husein mengakui keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telah membatasi kewenangan daerah.

Meski demikian, Darmansyah meminta daerah harus kreatif menggali potensi pendapat asli daerah (PAD). Seperti potensi perpajakan, misalnya pajak restoran yang belum tergali secara optimal. Masih banyak rumah makan, cafe, dan warung kopi yang belum terdata dan ditagih serta jumlah pembayaran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan.

“UU HKPD ini membatasi kewenangan daerah, namun diharapkan tidak membatasi inisiatif-inisiatif pemerintah daerah untuk menggali pendapatan secara optimal. Kami DPD RI siap membantu sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” kata Darmansyah dalam pertemuan dengan Bupati Belitung Timur, Jumat (12/8/2022).

Bupati Belitung Timur Burhanudin mengatakan, daerah yang dipimpinnya kaya akan sumber daya alam



Bupati Belitung Timur Burhanudin memberikan cinderamata kepada anggota Komite IV DPD RI Arniza Nilawati. (Foto Setjen DPD RI)

(SDA), tapi pendapatan daerah tidak maksimal, seperti timah. Hasil yang didapat dari royalti dan dana bagi hasil (DBH) tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan. Dia mengharapkan bisa mendapatkan porsi lebih. Selain timah, sumber pendapatan daerah lainnya dari perkebunan (kelapa sawit) dan perikanan.

Masalah lain yang muncul dalam pertemuan tersebut terkait pembatasan porsi 30 persen belanja pegawai dalam UU HKPD. Pembatasan itu harus dibarengi dengan penambahan dana alokasi umum (DAU) untuk membayar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (*)

Daerah Minta DAU Dinaikkan: Mau Bayar Utang?



Anggota Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto Setjen DPD RT)

Pemerintah daerah mengharapkan kepada pemerintah pusat agar kucuran dana alokasi umum (DAU) dinaikkan untuk bisa membayar pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Tolong untuk DAU agar dinaikkan agar kami bisa membayar pinjaman daerah,” pinta Josef Nae Soi kepada Komite IV DPD RI yang melakukan kunjungan kerja ke provinsi itu baru-baru ini yang dipimpin Wakil Ketua Komite IV Casytha A. Kathmandu.

Pinjaman PEN NTT disebut Josef Nae Soi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 906 km, irigasi dan jembatan di 22 kab/kota, menyiapkan sarana air bersih bagi masyarakat dan investasi yang diharapkan dapat menghasilkan penerimaan daerah.

“

Tolong untuk DAU agar dinaikkan agar kami bisa membayar pinjaman daerah.

”



Wakil Ketua Komite IV Casytha A. Kathmandu menerima cinderamata dari Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi. (Foto Setjen DPD RI)

Hanya saja, para senator yang ikut dalam kunjungan kerja itu, mengingatkan kepala daerah melakukan perhitungan secara matang soal besarnya pinjaman. Jangan sampai membebani pimpinan daerah berikutnya. Tidak kalah penting adalah nilai ekonomi yang ingin dicapai dari pinjaman PEN tersebut.

“Jangan sampai pinjaman ini menjadi beban pemerintahan berikutnya,” kata Senator Hilda Manafe (NTT) yang mengkhawatirkan Pemerintah Provinsi NTT tidak mampu melunasi pinjaman PEN. Pinjaman PEN NTT sudah di atas Rp1 triliun. (*)

Lahan Blok Masela Masih Bersengketa



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno (Tahun Sidang 2021-2022) dari senator dan Maluku Mirati Dewaningsih ketika menerima perwakilan ahli waris pemilik lahan di Pulau Nustual dan masyarakat Desa Lermatang, Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar yang tanahnya digunakan Blok Masela. (Foto Setjen DPD RI).

Ganti rugi lahan atau tanah yang digunakan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku masih bersengketa. Ganti rugi tanah masyarakat belum dibayarkan. Perwakilan dari ahli waris pemilik lahan yang digunakan Blok Masela itu mengadu ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Masyarakat yang merupakan ahli waris pemilik lahan yang digunakan Blok Masela itu merasa dirugikan atas penetapan harga tanah yang hanya dihargai

Rp14.000/ meter untuk lahan seluas 28,9 hektare. Penetapan harga tidak dilakukan atas kesepakatan bersama.

“SKK Migas dan Panitia Pengadaan Tanah tidak transparan dan penuh dengan paksaan serta intimidasi. Kami dipaksa menyetujui harga yang mereka tetap Rp14.000. Ini dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya berita acara,” kata Kornelis Serin, perwakilan dari ahli waris pemilik lahan dalam audiensi dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI yang turut dihadiri Wakil Ket-

ua DPD RI Nono Sampono Kamis (18/08/2022).

“

Ahli waris pemilik lahan yang digunakan Blok Masela itu merasa dirugikan atas penetapan harga tanah yang rendah.

”

Mereka mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Soumlaki dan diputus harga ganti rugi Rp172.000.

Akan tetapi Mahkamah Agung justru memutuskan ganti rugi tetap Rp14.000. Mereka mengaku mendukung sepenuhnya pembangunan Blok Masela sebagai proyek strategis nasional (PSN), tetapi hak-hak mereka juga harus diperhatikan.

Nono Sampono Terjun ke Lapangan

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama BAP melakukan kunjungan kerja menemui Desa Lermatang, Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (26/08/2022).

“Hari ini kita datang, dan mudah-mudahan basudara percaya bahwa kami akan menyelesaikan urusan ini dengan sebisanya yang kami lakukan, dengan azas keadilan,” kata Nono Sampono.

Senator dari Maluku itu berjanji



Kornelis Serin, perwakilan ahli waris pemilik lahan di Pulau Nustual dan masyarakat Desa Lermatang, Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar yang tanahnya digunakan Blok Masela ketika menyampaikan aspirasinya ke DPD RI. (Foto Setjen DPD RI).

akan memanggil semua yang terkait dengan masalah tersebut. Termasuk SKK Migas dan kementerian terkait. Hal ini sesuai dengan hak konstitusi yang dimiliki DPD RI.

“DPD RI akan selalu berada di pihak masyarakat dan daerah,” te-

gas Nono kepada warga setempat. Turut Ketua BAP DPD RI (2022-2023) Ajiep Padindang beserta para wakilnya, Bambang Sutrisno, Mirati Dewaningsih dan Arniza Nilawati, serta anggota DPD RI Dapil Maluku Novita Annakota. (*)



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama Pimpinan BAP melakukan kunjungan kerja menemui masyarakat Desa Lermatang, Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (26/08/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Dua Kali Mangkir, DPD RI Tak Mau Dilecehkan Lagi



Ketua Pansus BLBI DPD RI Bustami Zainudin didampingi Sukiryanto dan Darmansyah Husein saat pertemuan dengan salah seorang pemegang saham Bank Intan, di Gedung DPD RI, Rabu (10/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Panitia Khusus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pansus BLBI DPD RI) telah dua kali memanggil Antoni Salim. Namun pemilik Bank Central Asia (BCA) itu selalu mangkir.

Sesuai rekomendasi BPK RI, Pansus BLBI DPD RI memanggil sejumlah obligator untuk dimintai keterangannya. Termasuk Antoni Salim, pemilik BCA. Karena BCA termasuk yang terbesar menikmati kurungan dana BLBI.

“Pemanggilan obligor BLBI ini berdasarkan rekomendasi BPK RI ketika Pansus BLBI melakukan rapat dengan lembaga audit negara tersebut,” kata Ketua Pansus BLBI DPD RI Bustami Zainudin, Rabu (10/8/2022).

Bustami menjelaskan, Pansus BLBI DPD RI ingin segera menyelesaikan pekerjaannya, yang nanti hasilnya akan direkomendasi kepada pemerintah. Tetapi masih saja terganjal dengan ketidakhadiran obligator yang diundang, seperti Antoni Salim.

Pansus BLBI DPD RI sudah dua kali mengundang Antoni Salim, tetapi selalu mangkir. Terakhir Antoni Salim dipanggil tanggal 10 Agustus 2022 lalu. Dia tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

“Kami akan menggunakan kehormatan lembaga ini. Kita tidak ingin lembaga DPD RI dilecehkan oleh saudara Antoni Salim yang sudah dipanggil 2 kali tidak hadir,” tegas senator asal Lampung ini. (*)

Pimpinan Alkel DPD RI Dikocok Ulang



Sidang Paripurna DPD RI Ke-3 Masa Sidang I Tahun 2022-2023 pengesahan pimpinan alat kelengkapan DPD RI, Senin (22/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Pimpinan alat kelengkapan (alkel) DPD RI dikocok ulang. Hal tersebut sesuai dengan Tatib DPD RI, bahwa setiap memasuki awal tahun sidang dilakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan. Termasuk di awal tahun sidang 2022-2023.

Mereka yang sudah ditetapkan menjadi pimpinan di masing-masing alat kelengkapan tersebut, disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-3 Masa Sidang I Tahun 2022-2023, Senin (22/8/2022).

“Pimpinan DPD RI telah mengan-
tarkan pemilihan pimpinan alat



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada pemilihan pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Jumat (19/8/2022). (Foto Istimedia)

kelengkapan DPD RI, di masing-masing alat kelengkapan pada 19 Agustus 2022 lalu. Pemilihan telah terlaksana dengan baik dan

berlangsung dengan tertib, lancar dan demokratis,” kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat membuka sidang.



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono bersama pimpinan dan anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) usai pemilihan pimpinan alat kelengkapan 2022-2023, Jumat (19/8/2022).
(Foto Istimewa)

Pimpinan alat kelengkapan DPD RI 2022-2023

Komite I

- Ketua Andiara Aprilia Hikmat
- Wakil Ketua I Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim
- Wakil Ketua II Filep Wamafma
- Wakil Ketua III Darmansyah Husein

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

- Ketua Ahmad Nawardi
- Wakil Ketua I Sudirman
- Wakil Ketua II Andri Prayoga
- Wakil Ketua III Matheus Stefi Pasimanjeku

Komite II

- Ketua: Yorrys Raweyai
- Wakil Ketua I Abdullah Puteh
- Wakil Ketua II Bustami Zainuddin
- Wakil Ketua III Lukky Semen.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP)

- Ketua Ajiep Padindang
- Wakil Ketua I Bambang Sutrisno
- Wakil Ketua II Mirati Dewaningsih
- Wakil Ketua III Arbiza Nilawati

Komite III

- Ketua Hasan Basri
- Wakil Ketua I Evi Apita Maya
- Wakil Ketua II Habib Ali Alwi
- Wakil Ketua III Muslim M Yatim

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP)

- Ketua Sylviana Murni
- Wakil Ketua I Gusti Farid Hasan
- Wakil Ketua II Emma Yohanna
- Wakil Ketua III Maya Rumantri

Komite IV

- Ketua Elviana
- Wakil Ketua I Sukiryanto
- Wakil Ketua II Novita Anakotta
- Wakil Ketua III Abdul Hakim

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD)

- Ketua Stefanus BAN Liow
- Wakil Ketua I Ahmad Kanedi
- Wakil Ketua II Amang Syafrudin
- Wakil Ketua III Abdurrahman Abubakar Bahmid

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

- Ketua Dedi Iskandar Batubara
- Wakil Ketua I Muhammad Afran Hadikusumo
- Wakil Ketua II Aji Mirni Mawarni
- Wakil Ketua III Asyera Respati A Wundalero

Badan Kehormatan

- Ketua Leonardy Harmainy
- Wakil Ketua I Made Mangku Pastika
- Wakil Ketua II Eni Sumarni
- Wakil Ketua III Marthin Billa.

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Segera Dibahas



WAKIL KETUA PPUU DPD RI M Afnan Hadi Kusumo didampingi Aji Mirni Mawarni (wakil ketua) dan Badikenita Br. Sitepu menyerahkan draf RUU tentang Daerah Kepulauan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja di Baleg DPR RI, Selasa (24/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI berharap RUU tentang Daerah Kepulauan yang masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022 segera dibahas karena RUU tersebut harapan seluruh daerah kepulauan yang telah lama menunggu.

Selain itu, RUU Daerah Kepulauan hanya satu-satu RUU usulan DPD RI yang tersisa dalam Prolegnas saat ini. Sedangkan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah dibatalkan untuk dibahas dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMDes.

Kami meminta agar RUU ini bisa ditindaklanjuti. RUU ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama, mengingat secara geografis Indonesia merupakan negara dengan bentuk kepulauan terbesar di dunia,” kata Wakil Ketua PPUU DPD RI M Afnan Hadi Kusumo saat rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2022).

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya men-



WAKIL KETUA PPUU DPD RI M Afnan Hadi Kusumo dan Aji Mirni Mawarni serta anggota PPUU Badikenita BR Sitepu saat mengikuti rapat kerja di Baleg DPR RI, Selasa (24/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)

jelaskan. DPR RI telah menyiapkan 26 RUU Prioritas Tahun 2022, 12 RUU disiapkan dari Pemerintah, dan dua dari DPD RI.

“Walaupun ada 12 RUU yang disahkan menjadi UU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, sebenarnya RUU yang telah diselesaikan secara keseluruhan ada 23 RUU. Dimana 11 RUU lainnya merupakan RUU yang berasal dari kumulatif terbuka,” kata Willy. (*)

Komite I Perlu Aktif Awasi Kinerja GTRA di Daerah



Senator Fernando Sinaga dalam rapat pleno Komite I DPRD RI, Selasa (23/8/2022). (Foto Setjen DPRD RI)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengharapkan adanya peningkatan kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah dalam menyelesaikan konflik pertanahan akibat dari permasalahan HGU dan mafia tanah yang semakin menggurita di daerah.

Karena itu, Senator Fernando Sinaga meminta Komite I DPRD RI perlu pro aktif melakukan

pengawasan terhadap Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di provinsi, kabupaten dan kota. Ketua GTRA di daerah itu adalah ex officio gubernur, bupati dan wali kota.

“Sebagai wakil daerah, sudah menjadi tugas utama kita melakukan pengawasan atas kinerja mereka menangani konflik pertanahan, permasalahan HGU dan maraknya mafia tanah di daerah,”

kata Fernando Sinaga dalam rapat pleno Komite I DPRD RI, Selasa (23/8/2022).

Dia juga meminta Komite I proaktif melakukan pengawasan kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang saat ini sedang persiapan menggelar GTRA Summit tahun 2023 yang akan datang di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). (*)

BULD akan Fokus Pantau Ranperda Pajak



Penyerahan buku dari Pimpinan BULD Tahun Sidang 2021-2022 diwakili Wakil Ketua Husain Altting Sjah kepada Ketua BULD Tahun Sidang 2022-2023 Stefanus BAN Liow. (Foto Setjen DPD RI)

Karena sangat banyak produk hukum di daerah, maka pada Tahun Sidang 2022-2023, Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI akan fokus memantau dan mengevaluasi terhadap rencana peraturan daerah (ranperda) terkait pajak daerah dan retribusi.

Kesepakatan itu diputuskan dalam Rapat Pleno ke-2 BULD dengan agenda menetapkan pro-

gram kerja tahun sidang 2022-2023, prioritas kegiatan dan jadwal Masa Sidang I Tahun 2022, di Ruang Mataram Gedung B Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (25/8/2022). Rapat dipimpin ketuanya Stefanus BAN Liow.

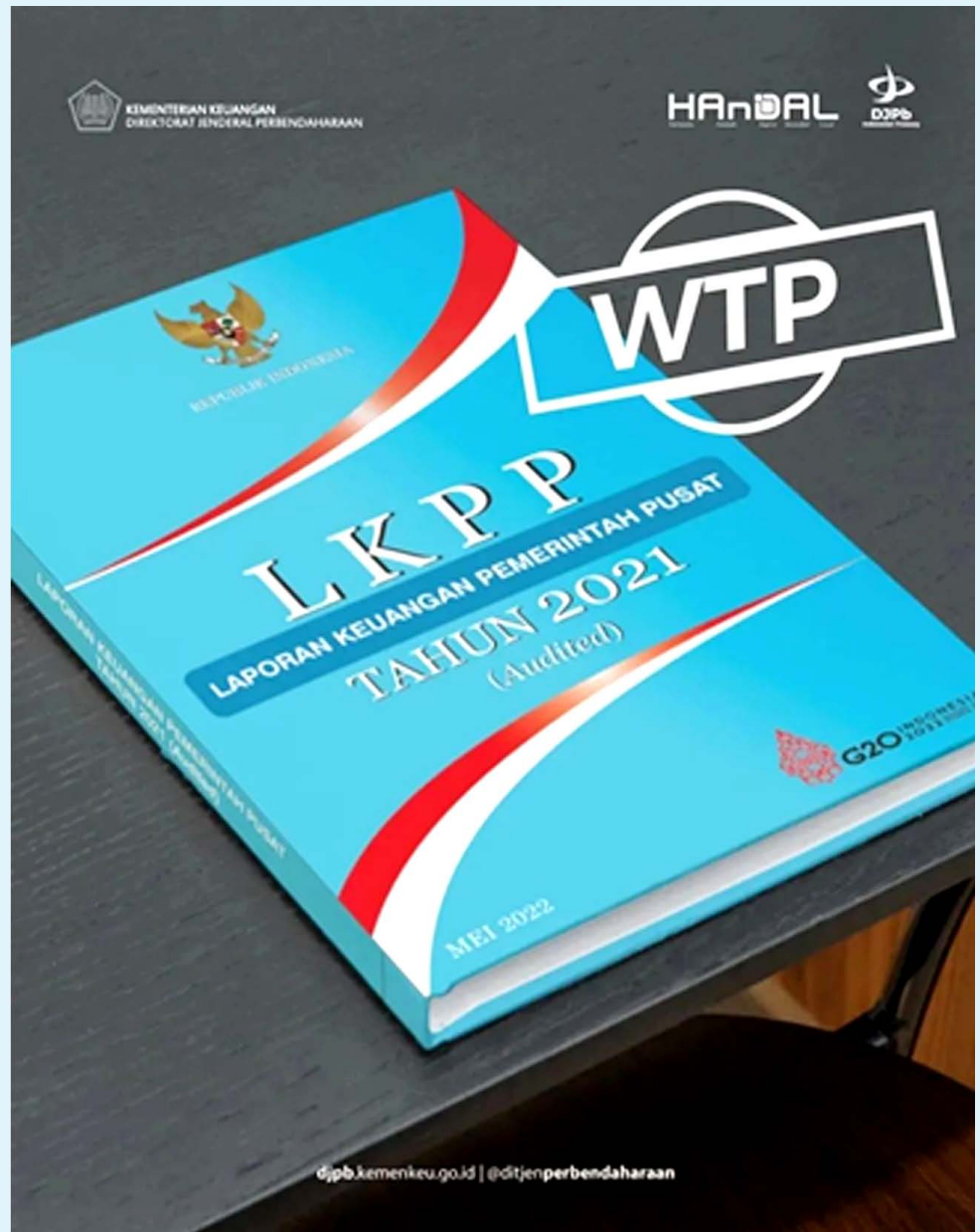
Selain itu, BULD juga melakukan evaluasi dan pemantauan Perda terkait kesehatan dan pajak, serta menindaklanjuti rekomen-

dasi hasil pemantauan dan evaluasi dengan mengundang pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan pemerintah daerah.

“BULD hadir untuk mendorong pembentukan produk hukum daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah. BULD memiliki tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda,” kata Stefanus. (*)

Luar Biasa!

DPD RI Raih Opini WTP Ke-16 Kalinya



Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dari BPK RI. Dengan demikian, maka DPD RI sudah 16 kali berturut-turut menerima opini tersebut.

Keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP selama 16 tahun itu, tidak lepas dari kinerja seluruh jajaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang telah bekerja optimal dalam mengadministrasikan dan membuat pertanggungjawaban atas laporan keuangan selama ini.

“Kita tidak boleh berpuas diri dengan penghargaan ini. Mari

jadikan WTP ini sebagai penunjang administrasi keuangan yang secara profesional dan akuntabel. Masih ada beberapa PR yang harus ditindaklanjuti,” kata Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPD RI Hartawan, dan Plh. Inspektur/Kepala Biro Protokol dan Humas dan Media (PHM) RI Mahyu Darma, di Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa (9/8/2022).

“

Kita tidak boleh berpuas diri. Mari jadikan WTP ini sebagai penunjang administrasi keuangan yang secara profesional dan akuntabel.

”



Sekjen DPD RI Rahman Hadi (tengah, kanan) menerima opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dari Pimpinan BPK RI. (Foto Setjen DPD RI)

Pimpinan dan anggota DPD RI mengapresiasi Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai *supporting system* telah melaksanakan dukungan dengan baik dan akuntabel yang dibuktikan dengan berhasilnya mempertahankan

kan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut.

“Kami atas nama seluruh anggota menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan, kerja keras

dan dedikasinya dalam memberikan dukungan kepada lembaga dengan penuh tanggung jawab,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Sidang Paripurna DPD RI, Selasa (16/8/22). (*)



Sekjen DPD RI Rahman Hadi menyerahkan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2021 kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Sidang Paripurna DPD RI, Selasa (16/8/22). (Foto Setjen DPD RI)

MENELAAH TEORI MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN EFEKTIF PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPALA DAERAH YANG MENERAPKAN POLITIK DINASTI (studi kasus Kabupaten Probolinggo)

Oleh: Khalizzad Khalis/Peneliti pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran



I. Pengantar

Dari data penelitian Nagari Institute (2020), bahwa pada tahun 2021 sebanyak 129 calon kepala daerah yang melakukan praktik dinasti politik, hal ini tersebar hampir diseluruh provinsi di Indonesia. Dari 129 calon kepala daerah tersebut, 57 calon menang dan 72 kalah. Jika dipersentasekan, maka 44% calon dinasti politik pada tahun 2020 terpilih menjadi kepala daerah.

Besarnya persentase terpilihnya dinasti politik di Indonesia, menggugah penulis untuk menelaah sejauh mana dinasti politik dapat mengikuti teori manajemen dan kepemimpinan efektif (ICMA University) dan apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dinasti politik di Indonesia.

II. Telaah Teori Manajemen dan Kepemimpinan Efektif Terhadap Dinasti Politik di Kabupaten Probolinggo

Pada tahun 2013 Puput

Tantriana Sari berhasil dilantik Bupati Probolinggo baru. Meskipun bukan sebagai petahana, Puput Tantriana Sari mempunyai hubungan kerabat dengan bupati petahana sebelumnya yaitu Hasan Aminuddin, dimana hubungan mereka adalah hubungan suami istri. Jadi dapat dikatakan pada tahun 2013, di pemerintah daerah kabupaten Probolinggo menerapkan praktik politik dinasti. Terpilihnya Puput Tantriana Sari pada 2013, ternyata berlanjut sampai 2018. Pada tahun 2018, sebagai petahana Puput kembali terpilih menjadi Bupati Probolinggo. Hal ini sedikit dapat menggambarkan bahwa dinasti politik Puput ternyata dipercaya oleh konstituennya di Probolinggo. Dari sedikit latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian deskriptif teori Manajemen dan Kepemimpinan Efektif (ICMA University) terhadap kepemimpinan Puput Tantriana Sari dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Dimana teori mana-

jemen dan kepemimpinan efektif dari ICMA University dibagi menjadi 14 kompetensi inti.

Setelah dilakukan telaahan secara deskriptif melalui sumber-sumber berita yang beredar di

internet, ditemukan bahwa dari 14 kompetensi inti yang teori manajemen dan kepemimpinan efektif, ternyata Puput ketika menjabat sebagai Bupati selama hampir 2 periode memenuhi 13

kompetensi tersebut, sedangkan 1 kompetensi lagi tidak terpenuhi akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang menjeratnya. Adapun 13 kompetensi tersebut yaitu

Adapun 13 kompetensi

1. <i>Community Engagement</i>	8. <i>Community and Resident Service</i>
2. <i>Equity and Inclusion</i>	9. <i>Service Delivery</i>
3. <i>Staf Effectiveness</i>	10. <i>Technological Literacy</i>
4. <i>Personal Resiliency and Development</i>	11. <i>Financial Management and Budgeting</i>
5. <i>Strategic Leadership</i>	12. <i>Human Resource Management and Workforce Engagement</i>
6. <i>Strategic Planning</i>	13. <i>Communication and Information Sharing</i>
7. <i>Policy Facilitation and Implementation</i>	

Kemudian 1 kompetensi yang tidak terpenuhi adalah kompetensi personal dan professional integrity.

III. Kelebihan dan Kekurangan Politik Dinasti

Salah satu penyebab maraknya politik dinasti di Indonesia disebabkan karena latar belakang sejarah bangsa Indonesia yang berbentuk kerajaan-kerajaan. Selain itu, peran partai politik serta lemahnya regulasi Pilkada juga mempengaruhi maraknya dinasti politik di Indonesia. Di mata masyarakat Indonesia, terutama masyarakat desa, dinasti politik dianggap sah dan normal dalam sistem pemerintahan. Namun hal ini di sisi lain, persepsi mahasiswa terhadap dinasti politik menyatakannya dengan tegas penolakan terhadap praktik tersebut.

Dampak negatif dalam sistem pemerintah, praktik politik dinasti dinilai dapat mengakibatkan terhambatnya proses demokrasi. Pada sisi akuntabilitas, kekera-

batan pada dinasti politik dapat mempengaruhi hasil suatu kebijakan, dimana dapat berpotensi melahirkan praktik korupsi. Selain itu, jika hubungan politik dinasti yang terbangun merupakan hubungan pusat dan daerah (misalnya suami pejabat di pusat dan istri pejabat di daerah), maka proses check and balance pusat dan daerah dapat terhambat.

Di sisi lain, praktik politik dinasti dapat mempunyai beberapa kelebihan. Misalnya, dalam hal kesiapan memimpin, dinasti politik dapat melahirkan orang yang sudah dididik sejak kecil untuk dapat menjadi pemimpin. Kemudian dari segi hak asasi, adanya politik dinasti menggambarkan bahwa semua warga Indonesia berhak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi pejabat daerah/pusat.

IV. Kesimpulan Penulis

Dari hasil telaah deskriptif diatas mengenai teori manajemen dan kepemimpinan efektif

serta kelebihan dan kekurangan politik dinasti, penulis menyimpulkan bahwa tantangan terberat dari praktik politik dinasti merupakan hadirnya potensi korupsi yang lebih besar. Hal ini juga terjadi pada lokus Kabupaten Probolinggo, dari 14 kompetensi yang di telaah, Puput berhasil memenuhi 13 kompetensi, dimana ini kemudian menjadikannya sebagai Bupati Probolinggo 2 periode (2013-2018 & 2018-2022) namun pada periode kedua pemerintahan Puput Tantriana Sari, ia dan suaminya tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Dengan begini, jika sistem pencegahan korupsi di Indonesia, terutama di daerah, masih belum mumpuni, penulis memilih untuk cenderung menolak praktik dinasti politik. Karena, mau bagaimanapun kelebihan praktik politik dinasti, jika sudah terlibat ke lingkaran korupsi, maka kelebihan itu tidak akan dapat dianggap lagi. (*)

Tugas Negara

Oleh : AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ketua DPD RI

Saya akan memimpin gerakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat. Mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang menjamin kedaulatan ada di tangan rakyat.

Saya harus konsisten dengan pilihan perjuangan yang harus saya lakukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara, melalui kelembagaan DPD RI. Di mana saya dipilih melalui Pemilu, dan diberi amanat oleh anggota DPD RI untuk memimpin.

Saya juga harus konsisten dengan nilai-nilai Pancasila yang telah final dan seharusnya menjadi *grondslag* bangsa ini. Sehingga menjadi tujuan hakiki dari gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat ini.

Saya harus membangun kesadaran bersama, bahwa kedaulatan rakyat adalah jalan keluar satu-satunya untuk mewujudkan cita-cita hakiki negara ini, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siapun yang menolak mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila, maka dia adalah pengkhianat bangsa. Dialah yang menginginkan ratusan juta rakyat Indonesia tetap terbelenggu dalam kemiskinan dan ketidakadilan.

Para pendiri bangsa ini telah merancang konsepsi utuh kedaulatan rakyat

yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa yang super majemuk ini.

Kedaulatan Rakyat untuk mengatur pemerintahan negara yang berada pada rakyat. Artinya, rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana mereka (rakyat) harus diperintah oleh pemerintah yang mereka bentuk.

Keputusan rakyat tersebut harus diambil dalam forum permusyawaratan yang ditetapkan dengan cara mufakat perundingan. Bukan

menang-menangan angka. Karena pikiran dan pendapat itu harus ditimbang. Bukan dihitung.

Sehingga bangsa ini membutuhkan lembaga tertinggi, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Di mana lembaga tersebut adalah wadah yang utuh. Yang menampung semua elemen bangsa. Tidak boleh ada yang ditinggalkan.

Mereka semua harus *equal*. Harus mendapat hak yang sama untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Sehingga demokrasi yang kita perjuangkan menjadi demokrasi yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat.

Karena hakikatnya demokrasi adalah alat bagi rakyat untuk menentukan masa depannya. Termasuk memaksa negara untuk mengelola kekayaan negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.

Jadi, ini adalah demokrasi yang semestinya mela-



AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI

hirkan pemerintahan yang diperintah oleh rakyat. Karena pemerintahan itu dibangun atas kehendak rakyat. Inilah yang disebut demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Karena pada hakikatnya kedaulatan itu adalah superanus, yang berarti “yang tertinggi” (*supreme*). Dan untuk bisa menjadi perwakilan di lembaga tertinggi haruslah para hikmat dan para bijaksana.

Konsepsi paripurna dari demokrasi Pancasila inilah yang belum pernah kita laksanakan secara murni. Bahkan kita tinggalkan total sejak amendemen konstitusi tahun 1999-2002 silam.

Inilah yang membuat perjalanan bangsa ini semakin menjauh dari cita-citanya. Dan rakyat, sebagai pemilik negara ini semakin menderita. Karena se-perti diungkap sejumlah ekonom, masih ada ratusan juta rakyat yang berpenghasilan 1 juta rupiah per bulan. Padahal negeri ini seharusnya gemah ripah loh jinawi.

Karena itu, kedaulatan rakyat harus berada di dalam wadah yang utuh. Yang menampung semua elemen bangsa yang super majemuk ini.

Di dalam wadah tersebut, terdapat partai politik. Terdapat wakil-wakil dari daerah. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote. Terdapat wakil-wakil dari golongan-golongan di negara ini. Badan-badan kolektif, koperasi, petani, nelayan, veteran, raja dan sultan Nusantara, ulama dan rohaniawan, cendekiawan, guru, seniman dan budayawan, maha putra bangsa, penyandang cacat dan seterusnya. Terdapat juga



wakil-wakil dari TNI dan Polri sebagai alat pertahanan negara dan pelindung masyarakat.

Partai Politik pun harus kembali kepada spirit terbentuknya partai politik yang mengacu kepada maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 3 November 1945 tentang Pendirian Partai Politik. Di mana di dalamnya jelas memberi restriksi agar partai politik juga memiliki tanggung jawab mewujudkan cita-cita negara ini.

Sehingga, sudah seharusnya anggota DPR RI diisi oleh kader dan aktivis partai terbaik, yang sangat memahami *platform* perjuangan lahirnya bangsa ini. Bukan diisi oleh siapa saja yang mampu mendulang suara terbanyak dalam pemilu legislatif.

Demikian pula dengan wakil-wakil dari golongan. Mereka adalah tokoh-tokoh terbaik yang

diberi mandat oleh organisasi-nya atau atas pilihan di antara mereka. Sehingga bukan ditunjuk dari atas. Tetapi benar-benar aspirasi dari bawah. Sedangkan wakil-wakil dari daerah adalah tokoh-tokoh putra daerah yang terpilih.

Sehingga prinsip bahwa semua elemen bangsa terwakili mutlak menjadi ciri demokrasi Pancasila. Untuk kemudian mereka yang disebut dengan para pikmat tersebut bermusyawarah mufakat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini.

Sekaligus memilih presiden dan wakil presiden untuk diberi mandat dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga presiden dan wakil presiden adalah mandataris rakyat. Alias petugas rakyat, yang secara berkala melaporkan kinerjanya kepada pemberi mandat. (*)

H. Faisal Amri, S.Ag, M.Ag:

PAW DPD RI dari Dapil Sumut



Faisal Amri menanda tangani berita acara pelantikannya disaksikan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin. (Foto Setjen DPD RI)

Faisal Amri dilantik sebagai anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Sumatera Utara, dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-13 Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, Senin (15/8/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 78/P Tahun 2022, tanggal 14 Juli 2022 tentang Peresmian Penggantian Antar Waktu Anggota DPD RI dan Anggota MPR RI Masa Jabatan

Tahun 2019-2024.

Dia menggantikan Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Pdt. Willem TP Simarmata yang meninggal dunia di usia 67 tahun di RS Columbia Asia Medan pada tanggal 17 Juni 2022 yang lalu.

Pengucapan sumpah dan janji anggota DPD RI dipandu oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin yang didampingi oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan disaksikan para anggota DPD RI yang hadir.

Faisal Amri sendiri merupakan pria asli Medan yang mengajar sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sumatera Utara. Pada Pemilu 2019 lalu, dia memperoleh suara terbanyak kelima sebagai calon anggota DPD RI di Provinsi Sumatera Utara, yaitu 496.618 suara. Setelah dilantik, Faisal bergabung dengan Komite IV DPD RI.

Ia adalah sosok suami sekaligus ayah yang baik dan bertanggungjawab, tegas namun tetap dekat dengan keluarga. Ia juga dikenal orang yang sa-

ngat menghormati tamu, dekat dengan para sahabatnya.

Smile dan *style* belahan rambutnya, membuat figur yang satu ini mudah dan cepat akrab dengan siapapun yang ingin berbuat baik untuk urusan di dunia dan akhirat. Sebagai seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tentu kepiawaiannya dalam memimpin sudah teruji, termasuk bagaimana membangun

jaringan. Dia juga orang yang santun dan hormat kepada guru, dosen dan senior dalam berbagai organisasi.

Sebagai seorang lulusan terbaik di Program Pasca Sarjana UIN Sumut, tentu Faisal Amri memiliki komitmen yang kuat untuk terus menambah kualitas keilmuannya. Termasuk mengaplikasikannya dengan mendirikan Sekolah Yatim & Dhuafa ZAMMI dibawah naung Yayasan Babud Darajah Al Amri. Sekolah itu sudah berjalan selama 4

tahun dengan menampung 40 anak yatim dan dhuafa setiap penerimaan santri dan santriwati baru.

Orangtua dan keluarga besar Faisal Amri sendiri diketahui berasal dari Pidie tapi sudah lama menetap di Medan, Sumatera Utara. Meski lahir dan menetap di Kota Medan, Faisal yang satu sekolah di Dayah Darul Arafah, Sumatera Utara dengan Ust Abdul Somad ini masih bisa berbicara bahasa Aceh.

(*berbagai sumber)



BIODATA

Nama lengkap	: Faisal Amri
Tempat/Tgl Lahir	: 28 Juni 1977
Istri	: Hafiza Cahyani
Pendidikan	: - SDN 060825 Medan - MTs dan Aliyah Darul Arafah Sumut - S1, Fakultas Syariah IAIN Sumut - S2, Hukum Islam UIN Sumut - Kandidat Doktor HIS, UIN Sumut
Organisasi	: - Ketua Umum HMI Komisariat FS IAIN Sumut - Ketua Umum IKAPDA Sumut - Ketua Umum Mafasyih UIN Sumut



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kanan), Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah), dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) saat memimpin Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, 16 Agustus 2022. Agenda Sidang Bersama adalah penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Indonesia dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. (Foto Panitia Sidang Bersama DPR RI-DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memasuki Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, untuk mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, 16 Agustus 2022. Agenda Sidang Bersama adalah penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Indonesia dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. (Foto Panitia Sidang Bersama DPR RI-DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima Dewan Pimpinan Pusat Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo), di Gedung B DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (11/8/2022). (Foto Setjen DPD RI)



Pimpinan dan anggota DPD RI usai sidang paripurna Pembukaan Tahun Sidang 2022- 2023 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (16/8/22). Sidang paripurna digelar setelah Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. (Foto Setjen DPD RI)



Tiga anggota DPD RI, yaitu Bustami Zainudin (Lampung), Sukiryanto (Kalbar) dan Fachrul Razi (Aceh) ketika menemui massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gerbang Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022). (Foto RMOL)



Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi (kiri) bersama Konjen RI di Cape Town A. Muhamad Siraj (kedua dari kiri), Kepala Biro Persidangan II Mesranian, Kepala Biro Keuangan Hartawan, dan Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Mahyu Darma (tiga dari kanan) saat melakukan studi banding ke Parlemen Afrika Selatan di Cape Town, 31 Juli hingga 3 Agustus 2022. (Foto Dok.Kemenlu)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan Selamat

HARI OLAH RAGA NASIONAL

9 SEPTEMBER 2022

